

Etika Pembangunan, Siapa yang Punya? Kasus: Ide Koperasi

Sajogyo

The article below traces the late Prof. Dr. Ace Partadiredja is one of Indonesian scholar of economics who supported ethic economics. In this context that the best alternative of Indonesia economic development is ethic-based. One of its economical institution is cooperation because it covers the vertical integration form from its member, an independent economical institution, and as a coalition of its member's interest and that of economical decision maker. So, it is accepted if there is an agreement that study of modernization and development as an interrelation which include political science, economics, sociology and the other branches of socio-cultural and each other give a mutual contribution to keep the ethic of development.

Kata-kata kunci: *ekonomik etik, kelembagaan, pembangunan, dan koperasi.*

Seruan almarhum Prof. Dr. Ace Partadiredja di dalam pidato pengu-kuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 1981 agar kita semua membantu menum-buhkan ekonomika etik, sampai mana sudah menjadi perhatian nyata dalam teori yang menjadi dasar praktek kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Jika kolega Prof. Dr. Mubyarto, setelah perjuangan lama berhasil mendirikan suatu lembaga studi "Ekonomi Pancasila" di UGM, yang disusul lembaga sejiwa di beberapa kampus lain, bagaimana ide dan peranan generasi penerus dalam memasuki abad-21 atau hampir 60 tahun sejak Proklamasi RI?

Dari sudut pandang non-ekonom, isi studi ekonomika di rata-rata fakultas ekonomi menunjukkan diferensiasi atas beberapa bidang studi: (a) Ekonomika Pembangunan, (b) Akuntansi (Negara dan Bisnis) dan (c) Manajemen. Apakah cukup kita mencermati sampai mana unsur "etika"

sudah tertanam baik di tiap bidang itu, yang sebagian mencermati ukuran patokan "pertanggung-jawaban" ISO-sekian dan sekian, dalam praktek-praktek para profesional itu?

Alternatif Pembangunan Indone-sia: Berlandaskan Etik

Di antara para ekonom ekonomi pembangunan yang membela "pereko-nomian rakyat", ada yang mengalami "jarak" antara sesama ekonom untuk memper-temukan teori ekonomika makro dan ekonomika mikro. Di satu pihak ada permainan "model" (deduktif, dukungan matematika/statistik) yang menentukan seluruh metode pengumpulan data bersumber data sekunder untuk mencapai kesimpulannya. Di lain pihak peneliti lain mulai juga dari berhipotesa, tapi lebih mengandalkan pencarian data di antara (sampel) orang (satuan lain) di tengah masyarakat, dalam survei berkuesioner. Metode induktif ini, dalam pemilihan sampel di tengah "satuan komunitas pedesaan" (misalnya) masih terkena rambu-rambu

tertentu, jika hasilnya akan diacu sebagai "studi komunitas pedesaan": ("village studies" menurut Lipton/Moore) masih bisa dibedakan antara satu dan lain (satuan) komunitas.

Dua orang ekonom (Prof. Mubyarto, Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan Prof. Bromley, University of Wisconsin - Madison, Amerika Serikat) menawarkan suatu "Development Alternative for Indonesia"¹, yang bertitik tolak dari menyoroiti arti "tantangan pembangunan".

Satu model menyatakan "pertumbuhan adalah penyebab pembangunan", suatu "alat" mencapai pembangunan, yang dicirikan oleh logika pemikiran deduktif atas dasar sejumlah aksioma ekonomi yang dipilih ditambah asumsi-asumsi tertentu, yang menghasilkan "teori" tentang bagaimana mencapai pembangunan ekonomi. Dari mata rantai deduksi itulah diperoleh "kebijakan" (ilmu) bagaimana mengatur proses pembangunan.

Jika sejumlah tindakan khusus (*policies*) dikenakan pada pola perilaku (sejumlah) orang, maka akhirnya akan membuahkan hasil tertentu dimana proses "pembangunan dapat berlangsung". Pilihan mengukur hasil pembangunan ada pada ukuran (pertumbuhan) pendapatan nasional per orang yang mudah dihitung.

Sebaiknya model "pembangunan adalah penyebab pertumbuhan" memilih pola yang dalam tahap awal terlebih dahulu membenahi dasar-dasar hukum dan politik perekonomian kita. Tanpa tindakan itu hasil upaya bertanam modal baru hanya akan menguntungkan mereka yang sudah lebih beruntung. Satu daftar sejumlah langkah pertama itu mencakup (misalnya) pemecahan masalah peluang bersekolah, pelayanan kesehatan, perbaikan status sosial-ekonomi perempuan, masalah

peluang ekonomi yang timpang, korupsi di jajaran birokrasi dan sebagainya. Pola-pola baru pengaturan fungsi-fungsi kelembagaan (pemerintah, bisnis dan organisasi rakyat) sangat menentukan upaya mengatasi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan pembangunan itu.

Ide mengenai (arti) pembangunan yang diacu oleh dua ekonom tersebut, adalah bahwa dalam pembaharuan kebijakan publik kita perlu mempertimbangkan 3 unsur esensial, yaitu (1) Etika yang merupakan dasar normatif dalam penegakan; (2) Hukum; dan (3) Ekonomika: yaitu ilmu yang mengkaji cara komunitas (negara) mengatur diri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam pembangunan ekonomi kita secara sadar berupaya menyesuaikan struktur kelembagaan negara dan dari sinilah akan timbul perilaku berekonomi. Kita sendirilah yang menciptakan pola baru kelembagaan itu. Para ekonom mesti mulai mengerti bahwa semua "pendekatan ekonomi" punya dasar ideologi. Banyak ekonom yang menilai "lain-lain sistem ekonomi itu terbebani nilai-nilai", sedangkan mereka menilai sistem pasar (*market*), mengikuti pemikiran ekonomika neo-klasik, adalah yang objektif, murni ilmiah dan seterusnya.

Para ekonom generasi tua yang sempat belajar ilmu ekonomika di Amerika, umumnya akan menyambut tulisan penting itu "adem ayem" saja, sudah di-"ramalkan" di buku itu. Alternatif Pembangunan Indonesia di awal abad 21 tinggal menunggu penggarapan konkret yang lebih banyak melibatkan generasi muda.

¹ Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

Terdapat studi yang berjudul "Open the social sciences" dikarang oleh Tim Antar-Disiplin pimpinan J. Wallerstein (1996) yang mengamati bahwa sejak 1945 di antara ilmu-ilmu politik, ekonomika dan sosiologi cenderung kurang "berurusan" satu sama lain, maka dianjurkan agar lebih membuka diri, satu terhadap yang lain. Sebenarnya sejak awal sudah dikenal ekonomika politik yang lebih "seimbang" dalam mencatat segi-segi politik dalam masalah perekonomian. (ada yang menamakan "Social economics" dan oleh pengamat pembangunan pertanian di Indonesia, dialihbahasakan menjadi "sosial-ekonomi", suatu alih bahasa yang salah!).

Akan menjadi lebih baik sekali jika kita menyepakati studi "modernisasi dan pembangunan" sebagai studi antar-disiplin, yang melihat ilmu politik, ekonomika, sosiologi dan cabang lain ilmu sosial-budaya yang tiap pihak dapat memberi sumbangan untuk menjaga etika pembangunan. Pengertian "pembangunan" ini telah berkembang makin kuat, dimulai dari dorongan moral untuk menghapus kemiskinan, yang tidak terbatas dalam arti peningkatan pendapatan, namun mencakup pula perbaikan kesehatan, penjagaan keamanan dan perdamaian, mengatasi pertentangan dan kekerasan antar-golongan dan pembagian "biaya pembangunan" yang tak seimbang dan tak adil antar-golongan, khususnya dalam hal membebani golongan si lemah, dimana beban "pembangunan" yang lebih besar justru pada orang banyak!

Mengutip Des Gasper (2004)² lebih jauh etika pembangunan membandingkan beragam interpretasi atas "pembangunan masyarakat" dalam arti luas "perubahan yang dicita-citakan", mempertimbangkan beragam jenis arti dan pembagian beban biaya-biaya serta hasil-hasil perubahan

besar ekonomi dan sosial, dimana kita mempertimbangkan beragam alternatif. Sejumlah tujuan dan jalur-jalur dipilih untuk mencapainya.

Diperlukan beragam cara berpikir yang sadar akan nilai-nilai yang tercakup. Upaya mengenali dan menentukan pilihan-pilihan etika dalam hal pembangunan masyarakat kita, mencakup upaya kita mendalami konsep dan teori hal etika itu sendiri yang merupakan suatu upaya bersama dari beragam bidang ilmu pengetahuan maupun etika budaya dan keagamaan.

Gasper terutama mengkritik para ekonom yang membawakan "economism" (sejumlah ide yang menyatakan bahwa sebagian besar hidup kita mesti dimengerti, dinilai dan dikelola menurut perhitungan ekonomi), bahwa ada lingkungan berbasis ekonomi yang terpisah (bernama "ekonomi") yang mesti dikelola sesuai persyaratan teknis yang berlaku umum dan/atau bahwa pertumbuhan ekonomi adalah intinya pembangunan. Kita tak mesti menyamakan pembangunan menurut arti perbaikan masyarakat, disertai pertumbuhan ekonomi dan hal-hal sosial yang terkait: ini lebih baik disebut "modernisasi".

"Konsep-konsep deskriptif seperti industrialisasi atau pertumbuhan ekonomi mesti dipisahkan dari interpretasi normatif atas (arti) pembangunan, agar kita dapat menilai secara normatif tiap kasus industrialisasi, pertumbuhan ekonomi atau modernisasi. Misalnya, kita perlu meneliti kemungkinan adanya hubungan antara kekerasan dan

² Gasper, Des: "The ethics of development" di CROP-Newsletter (Center Research on Poverty) Bergen, Norway, VII.11, No.2, May 2004, p.1-2

ketidakamanan dengan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi.

Secara khusus kita perlu mewaspadaikan dua konsepsi yang lazimnya membawakan konsepsi salah perihal arti pembangunan ("pertumbuhan kegiatan ekonomi") yaitu istilah "ke-efektifan" dan terutama (jika hanya terbatas memakai ukuran dampak ekonomi) istilah "efisiensi".

"Equity" ("persamaan hak") sering secara salah diperlakukan sebagai sesuatu keprihatinan subjektif di luar — berlawanan dengan — "efisiensi", lalu dibiarkan "seperti tak ada", sama halnya kehadiran orang-orang. Beragam aspek "equity" menuntut perhatian kita, dimana tiap aspek mewakili wujud "persamaan" ("equality") yang beda, beragam sikap hormat kita pada kemuliaan arti manusia, yang tiap kali minta pengakuan sah dalam satu dua kondisi.

Pengembangan Ide Koperasi

Sebagai contoh kepedulian seorang ekonom generasi penerus, khususnya dalam mengembangkan "ide koperasi", terdapat thesis Bayu Krisnamurthi (Dr. Ekonomi Pertanian, IPB, Bogor, 1998) yang menelaah perkembangan kelembagaan dan perilaku usaha KUD (Koperasi Unit Desa) di Jawa Barat dari satu kajian "cross-section" (data Profil KUD Mandiri dan data hasil audit KUD Mandiri, tahun 1996). Sebaran lokasi KUD dipilih dari 3 tipe wilayah pembangunan di Jawa Barat, yaitu (a) wilayah industri dan perdagangan, (kasus Bo-Ta-Bek dekat Jakarta), (b) wilayah pertanian dan (c) wilayah "sedang berkembang"³.

Tujuan kajian adalah mengenali keragaman dan tingkat perkembangan kelembagaan usaha KUD, khususnya perilaku usaha KUD (analisis hubungan antar struktur, perilaku dan kinerja usaha) untuk

mengetahui arah perkembangan dan implikasi strategi pengembangan kelembagaan dan usaha KUD.

Tipe pemikiran teoritik yang digunakan ada tiga yaitu *pertama*, teori ekonomi koperasi; yang menyatakan bahwa koperasi sebagai suatu badan usaha akan memiliki perilaku ekonomi sebagai (a) bentuk integrasi vertikal dari usaha anggota; (b) berlaku sebagai perusahaan mandiri yang terpisah dari kegiatan anggota; dan (c) sebagai koalisi kepentingan para pengambil keputusan ekonomi dan bisnis yaitu anggota, pengurus, manajer, dan pemerintah.

Kedua, teori tentang perkembangan kelembagaan koperasi yang diajukan oleh Cook (1995)⁴, yang menyatakan bahwa koperasi akan berkembang melewati empat tahap kelembagaan, yaitu (a) koperasi sebagai bentuk mekanisme defensif dari para anggotanya; (b) koperasi sebagai alternatif dibandingkan dengan pelaku usaha lain; (c) koperasi yang tengah menghadapi permasalahan struktur hak; dan (d) koperasi yang telah mencapai tahap manajemen berkelanjutan. Ketiga, kerangka pemikiran ekonomi kelembagaan yang menyatakan bahwa perilaku usaha ditentukan oleh struktur yang dimiliki atau dihadapi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, dan perilaku usaha tersebut kemudian akan menentukan kinerja usaha yang dihasilkan.

Berdasar faktor pembeda tingkat produktivitas, yaitu produktivitas anggota,

³ Krisnamurthi, B (1998): Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat: Suatu Kajian Cross-Section, Tesis Dr Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1998

⁴ Cook, M (1995): The Future of Agricultural Co-operatives; a Neo-Institutional Approach, American Journal of Agricultural Economics, December 1995

aset, modal, usaha dan Sisa Hasil Usaha (per anggota) dikenali 6 kelompok tingkat perkembangan KUD.

Secara ringkas hasilnya: (ragam "type"/ kelompok KUD)

1. Kelompok KUD Pra-Perusahaan: yang belum menunjukkan perilaku sebagai suatu badan usaha (19,4% sampel)
2. Kelompok KUD Transisi yang memiliki kinerja usaha lebih baik dari tipe pertama dan mengandalkan kegiatan usaha dari program pemerintah dan jumlah anggota (27,14% sampel).
3. Kelompok KUD Perusahaan, dengan kinerja usaha yang tinggi tapi kegiatannya sangat kecil keterkaitannya dengan usaha anggota (walau sempat memanfaatkan fasilitas program pemerintah) (14,9% sampel).
4. Kelompok KUD Koalisi, yang telah mampu menunjukkan kinerja usaha yang tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip koperasi: dalam memanfaatkan fasilitas program pemerintah, mengaitkan kegiatan usaha KUD dengan kegiatan usaha anggota. Berbagai aspek struktur, perilaku dan kinerja usaha KUD menunjukkan peringkat yang tinggi (aspek produktivitas anggota, nilai SHU total dan SHU per anggota). Tipe KUD yang paling potensial ini berjumlah 12,5% sampel
5. Kelompok KUD Program dimana kegiatan usahanya sempat tergantung dari program pemerintah (15,6%). Kinerja KUD tidak selalu buruk dan pada beberapa kondisi keberadaannya "dibutuhkan" (12,7% sampel).
6. Kelompok KUD Yang Menurun pada berbagai aspek usahanya.

Kesimpulan dari kajian tersebut adalah kecilnya jumlah KUD yang berkembang menjadi koperasi seperti yang diharapkan

sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang terhadap prinsip-prinsip koperasi dan penerapannya, pembentukan yang umumnya bersifat non-partisipatif, penyeragaman berbagai perangkat kelembagaan, besarnya campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kelembagaan dan usaha, serta besarnya kegiatan program yang harus dilaksanakan oleh KUD.

Kesimpulan itu adalah suatu penilaian jujur dan benar, atas hasil kebijakan bidang "perkoperasian" di masa pemerintahan Orde Baru, bermula dari kelahiran KUD dalam rangka Program Bimas (Bimbingan Masal) petani padi sawah dengan bibit padi unggul baru, pupuk pabrik dan penyediaan kredit, disusul pada tahap lanjutnya yang melibatkan pengarahannya Menteri Koperasi yang tercurah pada fungsi KUD yang terkait erat dengan fungsi lembaga BULOG, penjaga stock nasional beras, pendukung swasembada pangan beras.

Perilaku usaha masing-masing kelompok tersebut berbeda satu dengan lainnya, dan perbedaan perilaku tersebut memberikan pengaruh yang berbeda pula pada kinerja usaha. Beberapa perilaku umum diantara kelompok adalah bahwa seluruh kelompok, kecuali kelompok KUD Koalisi, berorientasi internal, yaitu menjadikan anggota sebagai pasar utamanya. Akibatnya KUD melakukan transaksi dengan anggota, dan perilaku usaha yang terjadi adalah bahwa anggota membeli dari atau menjual kepada KUD, padahal seharusnya adalah membeli atau menjual melalui KUD. Selain tidak mencerminkan prinsip-prinsip koperasi, hal tersebut membatasi pasar KUD atas jumlah dan daya beli anggota.

Kegiatan pelayanan, baik pelayanan produksi dan konsumsi, merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan. Namun,

kecuali pada kelompok KUD Koalisi dan KUD Perusahaan, tidak terdapat spesialisasi usaha yang mampu mendorong terciptanya keunggulan dan efisiensi. Kegiatan usaha agribisnis merupakan kegiatan yang potensial dan sangat penting dalam struktur usaha KUD. Bersama kegiatan usaha non-program, kegiatan usaha agribisnis merupakan kegiatan yang memberi pengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas. Di samping itu strategi integrasi usaha juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja. Terdapat indikasi pula bahwa jumlah anggota beberapa kelompok KUD telah melewati tingkat optimalnya, yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif penambahan anggota terhadap kinerja usaha.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat perkembangan koperasi sangat ditentukan oleh (a) orientasi usaha, (b) pengembangan usaha utama yang berbasis agribisnis pada sub-sistem produksi dan pemasaran terutama yang non-program dan mampu menciptakan integrasi usaha, serta dengan mencapai tingkat jumlah anggota yang optimal.

Arah perkembangan yang diharapkan dari masing-masing kelompok adalah dari Pra-Perusahaan ke KUD Transisi; dari KUD Yang Menurun ke KUD Transisi, dari KUD Transisi ke KUD Koalisi, dari KUD Program ke KUD Koalisi, dari KUD Perusahaan ke KUD Koalisi, dan pada kemudian hari dari KUD Koalisi ke KUD Berkelanjutan. Analisa instrumentasi kebijakan dengan menggunakan perubahan-perubahan struktur dan perilaku yang diajukan dalam model telah mampu mewujudkan sebagian dari arah perkembangan ideal tersebut.

Kajian tersebut juga menyarankan "untuk menyertakan informasi langsung dari para pengambil keputusan, yaitu anggota,

manajer, pengurus koperasi dan Pemerintah"! Hal ini sangat luar biasa dimana riset ekonomi taraf Studi Doktor itu telah mampu menarik kesimpulan penting dari data sekunder (statistik dan data audit sejumlah KUD). Seperti layaknya ilmuwan yang telah memakai alat secanggih "satelit" yang diorbitkan di atas bumi dan mampu merekam catatan yang dapat dibaca alat berdasar metode ekonometrika. Bahkan atas dasar analisa yang dibuat ilmuwan mampu menentukan arah perkembangan yang sebaiknya ditempuh dalam mencapai status/kondisi yang disyaratkan, dalam hal ini type koperasi "KUD koalisi"!

Konsistensi dalam mengembangkan ilmu bagi ekonom Bayu Krisnamurthi (ataupun tokoh lain) dapat kita temukan dalam karya tulisan sekian tahun kemudian setelah karya tesis tersebut. Salah satu contohnya adalah telaah karangan BK yang termasuk kumpulan karangan yang dihimpun Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian IPB untuk diterbitkan bulan September 2004 (Dies ke 41, IPB, Bogor). Secara khusus pada bagian pertama dari judul panjang ("revitalisasi strategi pengembangan KUD...") menyambung arah dan isi pendalamannya perihal koperasi KUD 6 tahun sebelumnya⁵.

Permasalahan KUD yang diangkat merinci beberapa hal, *pertama*, hubungan antara KUD dan anggota yang mengangkat hasil riset tesis 1998 (kasus Jawa Barat) dan *kedua*, hubungan antara KUD-KUD yang "lebih banyak bersifat kompetitif daripada kooperatif", misalnya dalam bentuk jaringan (*network*) kerjasama antar-KUD. Masalah ketiga, perihal perkembangan

⁵ Judul lengkap karangan singkat "Revitalisasi Strategi Pengembangan KUD dalam Mendukung Kemajuan Pertanian Indonesia"

anggota (petani) dan KUD dimana untuk pertama kali dicatat adanya perbedaan atas status 3 golongan (lapisan) petani, yaitu (a) buruhtani/petani mikro/petani gurem, (b) petani menengah dan (c) petani maju/pengusaha tani. Di sinilah baru diangkat prospek proses "transformasi" dari petani kecil/petani tunduk ("*peasant*") menjadi petani mandiri ("*farmer*"). Dan secara terus terang dinyatakan bahwa "anggota koperasi lebih diharapkan berasal dari kelompok kedua, lapisan petani menengah"!

Di lain pihak petani maju di lapisan atas menilai punya lingkup usaha yang tak cukup terlayani oleh koperasi. Mereka mengharapkan peran asosiasi petani yang lebih kuat.

Kondisi internal KUD dicatat sebagai masalah ke-empat, dimana hasil riset KUD di Jawa Barat dirujuk, dikelompok-ringkaskan dalam 3, bukan 6 kelompok (type) perkembangan koperasi.

Kaitan antara strategi pengembangan KUD dengan strategi pembangunan pertanian Indonesia di awal abad 21 ini, sayang sekali tidak terangkat dalam karangan singkat itu. Padahal penulis adalah ekonom yang tahu selukbeluk agribisnis kita, termasuk usahatani kecil.

Yang menarik adalah uraian hal "tantangan awal, yaitu reformasi kebijakan makro", suatu tanda sebagai ekonom telah belajar banyak dari masa beberapa tahun aktif di lingkungan "finek" di Pusat, sebelum menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan, IPB. Jika dirumuskan dalam bentuk sejumlah pertanyaan:

1. bagaimana merubah strategi industrialisasi ke (titik berat) agroindustri yang berbasis pada sistem agribisnis domestik? (Sebelum kita terkena krisis ekonomi pernah IPB

dibantu Bappenas, merumuskan konsep "pertanian sebagai industri", tapi tak dirujuk).

2. bagaimana mencapai penurunan sukubunga tinggi dalam kebijakan moneter?
3. bagaimana kebijakan "keamanan pangan" tak disamakan dengan kebijakan bahan pangan murah (yang merupakan petani kita)?
4. bagaimana reformasi pengelolaan agribisnis berkembang secara lebih integratif? (memakai ukuran hasilnya pengembangan agribisnis yang terintegrasi baik secara vertikal, dimana petani sebagai produsen primer terhindar dari marjinalisasi berganda).

Jika kita belajar dari pengalaman reforma agraria di Taiwan dan Jepang setelah akhir Perang Pasifik (dibantu pengaruh Amerika Serikat sebelum masa Perang Dingin), konon golongan pengusaha yang mendominasi perekonomian desa (pertanian) didorong untuk lebih banyak memasuki perekonomian di perkotaan yang lebih menarik, maka terbukalah peluang bagi golongan petani di pedesaan yang memilih jalur koperasi dan membawa sukses besar. Itu contoh dari negeri yang memilih "kapitalisme" sesuai corak budaya masing-masing. Apakah karena di Indonesia lebih banyak kapitalisme semu ("*erzats*") yang berkembang, maka koperasinya juga koperasi semu (antara lain di bawah nama KUD) yang menjadi nasib kita?

Penutup

Sebagai penutup, seharusnya kita menempuh jalur yang mampu mempertemukan berbagai pihak yaitu mereka yang serius berupaya memperjuangkan kemajuan pertanian kita (dalam beragam bentuk usaha: sesuai potensi produk dan pasaran, pilihan lokasi dan sistem pengembangan,

satu dan lain atas dasar pembaruan Reforma Agraria) dan di lain pihak mereka yang berusaha mendukung kebangkitan kelembagaan koperasi di pedesaan yang berbasis anggota, sesuai potensi golongan penduduk, mencakup potensi koperasi kredit yang selama Orde Baru justru mampu berkembang mandiri karena diabaikan Pemerintah.

Upaya mempertemukan kedua pihak itu agar melibatkan potensi aparat pemerintah daerah yang sedang bereksperimen dalam membangun otonomi masyarakat daerah dan bersikap berpihak pada golongan petani di desa.

Proses kerjasama "segi tiga" itu sebaiknya membuka peluang "*action research*", belajar bersama (dalam dialog, belajar satu sama lain) sambil tiap pihak bertindak secara setara, dalam keterbukaan satu sama lain. Atas dasar tanggung jawab tiap unsur pendukung (termasuk ilmuwan dan pelajar di kampus) memberi "iuran" sesuai kemampuan, dimana pemerintah pusat menyediakan dana pendorong awal dalam rangka "transformasi" ini, disusul oleh pihak bisnis, antara lain pihak bank yang bersedia melihat prospek baru dalam proses "transformasi" itu.

Baik dicatat bahwa istilah "unit Desa" (pada "nama Koperasi") berasal dari masa awal bank BRI mengembangkan sistem pelayanan ke pedesaan, dari ibukota kabupaten menjangkau satuan kecamatan untuk mendekati petani di desa-desa. Hasilnya telah menguntungkan bank BRI itu. Kini gilirannya koperasi yang membuka peluang "dari desa", terutama atas dasar memperjuangkan kepentingan petani desa, tanpa dibebani oleh hal-hal yang mereka tak

mengerti dan tak siap mereka pikul. Dengan demikian sudah lewatlah masa "pemerintah yang lebih tahu", atau "banklah yang lebih tahu" (atau jenis bisnis lain). Paling bijaksana jika kita bersama-sama menentukan apa yang paling baik bagi rakyat banyak; yang tidak lain adalah dari belajar bersama rakyat itu! ●

Daftar Pustaka

- Anonim (2004) "Revitalisasi Strategi Pengembangan KUD dalam Mendukung Kemajuan Pertanian Indonesia" Makalah Seminar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, IPB
- Cook, M (1995): *The Future of Agricultural Co-operatives; a Neo-Institutional Approach*, American Journal of Agricultural Economics, December 1995
- Gasper, Des (2004) "The ethics of development" di CROP-Newsletter (Center Research on Poverty) Bergen, Norway, VII.11, No.2, May 2004, p.1-2
- Krisnamurthi, B (1998): *Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat: Suatu Kajian Cross-Section*, Tesis Dr Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1998
- Mubyarto dan Broamly (2002) "Alternative Development for Indonesia" Yogyakarta:Penerbit Gadjah Mada University Press.

